

REVITALISASI PANCASILA DALAM KONTEKS NATION AND CHARACTER BUILDING

Armaidy Armawi*)

Keadaan sehari-hari tampak sembrawut, jauh dari rasa aman, ketertiban, keteraturan dan kedisiplinan. Masing-masing memmanifestasikan ke-egoisannya dan tidak peduli satu sama lainnya. Ternyata mereka yang dikategorikan sebagai kaum terpelajar sama saja dengan masyarakat awam, tidak mau peduli, egois, serta jauh dari sikap yang berdisiplin. Kondisi ini juga merambah instansi-instansi pemerintah yang juga menunjukkan ketidakteraturan, ketidaktertiban, dan ketidakdisiplinan. Banyak di antara karyawan di waktu jam kerja yang ngobrol, baca koran, dan jalan-jalan, sementara warga masyarakat memerlukan penyelesaian perizinan bagi pengembangan usahanya. Masyarakat lebih memilih untuk mengabaikan peraturan-peraturan dan tidak memiliki nurani sedikitpun tentang melanggar peraturan-peraturan. Ketidaktertiban, tidak adanya upaya penegakan hukum, dan seringnya menyelesaikan masalah dengan kekerasan sehingga sering bertindak represif, enggan menghargai orang lain serta tidak mau dan mampu berkoordinasi.

Masyarakat yang tidak punya jaringan horizontal, yang dapat bekerja sama dan saling berkoordinasi, tidak mungkin memperoleh manfaat sosial ekonomi. Yang akan muncul adalah ketimpangan sosial ekonomi dan ini akan menyulitkan untuk dapat menjadi masyarakat yang kompetitif. Masyarakat dalam lembaga-lembaga publik kita, masih

jauh dari kedisiplinan dan ketertiban. Ketidaktertiban itu melekat pada masyarakat sehingga kebudayaan masyarakat kita begitu longgar. Terlalu banyak memberikan kemudahan kepada individu untuk mengubah aturan-aturan sesuai dengan keperluannya sehingga mendorong munculnya sikap seenaknya sendiri, tidak menepati janji, tidak

*) Dr. Armaidy Armawi, Dosen Fakultas Filsafat Universitas Gadjah Mada.

mau bertanggung jawab, dan tidak disiplin. Masyarakat petani tetap berada dalam kemiskinan. Para pengusaha juga dihadapkan pada aturan-aturan birokrasi yang semakin membebani keuangan mereka. Di sana-sini muncul kelompok sipil yang hanya mementingkan kepentingan kelompok dengan mengatasnamakan masyarakat. Sejumlah faktor sosial, budaya, politik, dan ekonomi memberikan kontribusi kepada perilaku yang buruk tersebut. Kesenjangan sosial ekonomi yang cukup tajam dalam masyarakat sekarang ini, akan menimbulkan kecemburuan sosial. Ikatan sosial yang kuat antara seseorang dengan kelompok etnis dan kerabatnya, juga ikut mendorong pada ketidakpedulian terhadap kelompok lain.

Adat istiadat dan budaya masyarakat di beberapa daerah mengalami cukup banyak perubahan yang signifikan sehingga merubah perilaku dan sikap masyarakat terhadap sentimen kedaerahan. Sentimen kedaerahan ini terwujud dalam bentuk maraknya tuntutan masyarakat tentang hak atas kepemilikan tanah di berbagai daerah meskipun tidak mempunyai bukti hukum yang sah atas kepemilikan. Reformasi diartikan sebagai suatu kebebasan sehingga merupakan perilaku dan sikap yang memaksakan kehendak

baik secara damai maupun arogan. Reformasi cukup banyak menelan korban dan menimbulkan penderitaan bagi rakyat karena munculnya berbagai keresahan sosial dan cenderung menimbulkan konflik vertikal maupun horizontal. Dengan demikian terlihat bahwa terjadi kelumpuhan-kelumpuhan sosial (*social entropy*) di dalam masyarakat di mana terjadi keretakan dan penyimpangan dalam hubungan sosial.

Dampak Globalisasi Terhadap Proses *National Character Building*

Abad ke-21 ini merupakan suatu masa yang sangat dipengaruhi oleh perkembangan ilmu pengetahuan dan kemajuan teknologi. Satu hal yang tidak dapat disangkal ialah penerapan hasil teknologi modern telah membawa kemajuan di bidang industri, dan mengakibatkan perubahan serta pergeseran dalam sikap hidup dan tata nilai yang berkaitan erat dengan masalah etika dan moralitas. Ini merupakan tantangan dalam kehidupan dunia modern, di mana nilai-nilai kemanusiaan menjadi semakin menipis. Dia tidak hanya berhadapan dengan masalah yang bersifat regional, tetapi juga telah bersifat global, spektakuler, dan fundamental.

Manusia modern semakin ter-

perangkap ke dalam kubang yang digalinya sendiri. Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi pada peradaban modern telah membuatnya pongah yang akhirnya menjerumuskan manusia ke dalam kehidupan yang semu. Ilmu pengetahuan juga telah menimbulkan masalah yang membawa kerugian dan kehancuran manusia itu sendiri, seperti: keresahan, keterasingan, serta terperangkapnya ke dalam struktur yang dibuatnya sendiri. Dengan demikian terjadi suatu proses *dehumanisasi* dan *depersonalisasi*, yang menjadi ciri kehidupan modern.

Dampak globalisasi yang berakibat pada hampir merambah segenap aspek kehidupan umat manusia, telah menjadi suatu kendala dan tantangan dalam proses *nation character building*. Kondisi masyarakat Indonesia saat ini dapat dinyatakan sangat rentan terhadap isu, dan mudah terhasut, sehingga tidak lagi mencerminkan adanya ketangguhan individu yang kokoh.

Kerusuhan kini telah menjadi *trend* di berbagai daerah di Indonesia, hingga ke pelosok pedesaan. Sedikit perselisihan saja seringkali meletupkan aksi pembakaran, penjarahan, dan perusakan massa. Apabila dilihat dengan jernih, lahirnya kerusuhan dan aksi kekerasan seperti itu sangat bertolak belakang dengan

bangsa Indonesia yang religius dan menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila. Kemungkinan besar terjadinya semua aksi tak manusiawi disebabkan oleh terjadinya krisis kegersangan spiritual serta menipisnya etika dan moralitas yang menghinggapi manusia modern.

Penekanan pada pembangunan ekonomi yang berlangsung selama era pembangunan fisik justru memperlihatkan terjadinya krisis kebangsaan (*nationalism*). Hal ini dibarengi pula oleh terjadinya kesenjangan sosial yang menggambarkan adanya krisis mentalitas berbangsa yang dalam hal ini berkaitan langsung dengan masalah etika dan moralitas.

Pemahaman Nasional *Character Building*

Pemahaman tentang makna *nation character building* menjadi sangat penting dan strategis karena adanya indikasi rapuhnya ketahanan individu pada dewasa ini yang tampak semakin nyata, seperti banyaknya kerusuhan yang berasal dari adanya hasutan, prasangka dan berubah menjadi bentuk kebringasan massa. Prasangka dewasa ini telah menjadi salah satu sumber konflik yang potensial dan mengakibatkan terjadinya disintegrasi moral masyarakat Al Quran

telah menyatakan dalam surat An Nuur 19:

Sesungguhnya orang-orang yang ingin agar (berita) perbuatan yang amat keji itu tersiar di kalangan orang-orang yang beriman, bagi mereka azab yang pedih,

dan Al Hujarat 12

Hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan dari prasangka. Sesungguhnya sebagian prasangka itu adalah dosa, dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain, dan janganlah sebagian kamu menggunjing sebagian yang lain. Sukakah salah seorang diantara kamu memakan daging saudaranya yang sudah mati? Maka tentulah kamu merasa jijik kepadanya.

Hal ini telah menjadi spektrum ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan (ATHG) yang serius dan nyata bagi bangsa Indonesia dalam menjaga integrasi nasional. Krisis kepercayaan, ekonomi, hukum, dan politik, telah melahirkan adanya tuntutan untuk melakukan reformasi di segala bidang, akibatnya kehidupan berbangsa dan bernegara menjadi labil, cepat goyah dan rentan terhadap terpaan berbagai isu, hasutan dan prasangka. Dalam kerusuhan, ada yang bermotif suku, agama, ras, dan antar golongan (SARA), politik, ekonomi, dan hukum.

Terjadinya kerusuhan beberapa waktu lalu, berdimensi pada masalah suku, agama, ras, antargolongan (SARA). Peristiwa-peristiwa kerusuhan muncul

karena masyarakat mudah sekali berprasangka, terhasut dan berubah menjadi beringas. Maraknya perkelahian dan perusakan fasilitas umum seperti telpon umum, halte bus, serta rambu lalu lintas menjadi semakin jauh dari "slogan pemuda harapan bangsa dan sebagai generasi penerus". Sikap egois, apatis terhadap pembangunan dan individualis inilah yang merupakan tantangan bagi ketahanan individu yang akan bermuara pula pada ketahanan nasional.

Maraknya kekerasan, kebrutalan, dan kebringasan dewasa ini membuat semua komponen masyarakat harus waspada - mulai dari pemimpin agama, pendidik, pemerintah, dan juga masyarakat sendiri. Mereka tidak saja harus mencegah lahirnya kekerasan dan kekejaman, tetapi juga harus menyebarkan kesadaran nilai-nilai Pancasila di tengah masyarakat yang kering spiritualitasnya. Oleh karena itu, disadari atau tidak, munculnya tindakan kekerasan akhir-akhir ini adalah karena lalainya manusia pada nilai-nilai religius, etika, dan moralitas. Seandainya agama selalu dijadikan sebagai pedoman hidup, maka tidak akan ada kekerasan dan tidak akan ada kebencian sesama manusia. Sebab, dalam Alquran sudah ditegaskan, "Innamal mu'mi-

nuuna ikhwatun” (Sesungguhnya orang-orang mukmin itu adalah bersaudara, Q.S Al-Hujurat: 10)

Patut kiranya kita renungkan hadis nabi yang berbunyi, “Engkau lihat orang-orang yang beriman itu dalam kasih sayang, cinta-mencintai, dan tolong menolong, adalah bagaikan satu tubuh. Jika ada salah satu anggota terkena penyakit, maka seluruh tubuh itu tidak dapat tidur dan semuanya merasakan sakit”.

Krisis Identitas Nasional

Persoalan yang serius sesungguhnya bukan hanya mengenai kadar isu itu sendiri, melainkan terletak pada kohesivitas sosial di antara warga bangsa yang semakin menipis sehingga masyarakat sangat rapuh dan mudah termakan oleh isu. Hal ini mencerminkan lemahnya ketahanan individu, yang akan mengancam pula rapuhnya ketahanan nasional. Ada tiga faktor penyebab krisis identitas nasional (*national identity*). *Pertama*, tiadanya apresiasi yang tanpa ragu-ragu dan jelas terhadap batas-batas geografis suatu bangsa. *Kedua*, proses perubahan sosial dan pembangunan industri yang sedang berlangsung. *Ketiga*, pengaruh budaya Barat yang dibawa oleh kelas menengah.

Semua tantangan itu, mem-

perlihatkan bagaimana beratnya upaya pembentukan watak bangsa (*nation character building*) dalam pembangunan yang didominasi oleh ekonomi (*economy minded*). Oleh karena itu, perlu diteliti kembali apa yang menyebabkan masyarakat cepat berubah menjadi beringas terhadap bangsanya sendiri, sedangkan pada jaman penjajahan kebringasan tetap dalam konteks nasionalisme untuk melawan penjajah. Dengan demikian sangat dimungkinkan bahwa *nation character building* masa lalu dan masa sekarang mengalami perubahan. Disaat seperti inilah *nation character building* menjadi sangat penting, mendasar, dan strategis dalam menghadapi ketidakpastian masa depan.

Bagi ketahanan individu, *nation character building* menjadi dasar dan bangunan yang kokoh dalam upaya menegakkan ketahanan nasional. Ketahanan Individu dapat diartikan sebagai bagian dari keseluruhan sosialisasi dan interaksi yang menekankan pada semakin kokohnya mentalitas — dalam hal ini berpegang teguh pada nilai-nilai Pancasila — pada diri pribadi seseorang dalam melihat kehidupan sehingga menempatkan dirinya merupakan bagian aktif dari proses pembangunan secara global. Makna pembangunan adalah untuk meningkatkan taraf

hidup manusia Indonesia sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaannya. Dalam membangun, tentu membutuhkan proses, dan proses inilah yang nantinya akan berhadapan dan mengalami tantangan, ancaman, hambatan dan gangguan (TAHG) yang harus dihadapi, disiasati, dan diatasi yang pada era globalisasi ini TAHG jauh lebih kompleks. Oleh karena itu salah satu unsur yang penting dan esensial dalam menanggulangi dan menjawab tantangan globalisasi adalah dengan menyiapkan sumber daya manusia semaksimal mungkin, yang tidak lepas dari ciri khas kebangsaannya (*national identity*) di atas fondasi prinsip etika dan moralitas yang kokoh. Pembentukan *nation character building* dapat melalui lingkungan keluarga, masyarakat, organisasi-organisasi dan pendidikan formal.

Revitalisasi Pancasila

Semasa Orde Baru Pancasila menjadi keharusan yang berlaku di setiap elemen dan pranata kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Hal ini terlihat dalam kegiatan penataran P4 dan dipergunakan sebagai alat untuk melanggengkan kekuasaan. Pancasila telah dibunuh atas nama Pancasila sendiri. Namun ketika reformasi bergulir kegiatan tersebut sirna

dan lenyap karena dianggap sebagai produk Orde Baru yang tidak lagi riil dalam prakteknya serta tidak bermanfaat. Sejak gerakan reformasi bergulir di tanah air, tampaknya mulai terjadi kecenderungan untuk menafikan, bahkan meninggalkan nilai-nilai Pancasila di tengah arus perubahan yang begitu deras.

Apatisme terhadap Pancasila pada era reformasi juga terlihat dari sikap sebagian anak bangsa yang cenderung untuk tidak peduli, dan bahkan generasi muda sekarang banyak yang tidak mengenal lagi nilai-nilai dalam Pancasila. Dewasa ini untuk melaksanakan nilai Pancasila yang ideal mendapat tantangan yang cukup berat di tengah gempuran globalisasi dan semakin modernnya masyarakat Indonesia yang lebih menyukai nilai-nilai materialistik dan hedonistik. Bagi sebagian orang Indonesia Pancasila itu utopis dan sebuah ideologi yang susah untuk diwujudkan atau sebuah mimpi yang sulit untuk direalisasikan.

Minimnya teladan dari kalangan atas, yaitu mereka-mereka yang duduk di pemerintahan yang seharusnya dapat mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila dalam menjalankan penyelenggaraan negara, juga menjadi alasan semakin apatisnya

generasi muda terhadap Pancasila karena dirasakan belum mampu memenuhi tuntutan. Nilai-nilai Pancasila seolah-olah hanya hinggap sejenak di otak kemudian sirna untuk dilupakan dan tidak adanya satu kata dan perbuatan, karena Pancasila hanya dijadikan konsep yang dihafalkan bukan diamalkan karena tidak mampu menyelami Pancasila.

Oleh karena itu, pada era reformasi ini kita kehilangan pedoman dalam berperilaku dan bertindak, akibatnya banyak orang yang mencari ideologi lain. Mereka berperilaku dan bertindak menurut ideologi masing-masing sesuai dengan kepentingan kelompok, etnik, dan agama. Nilai-nilai sopan santun dan solidaritas sosial sekarang ini semakin pudar seiring dengan terjadinya kelumpuhan sosial (*social entropy*) di masyarakat. Lemahnya kemampuan kita dalam mengelola keragaman mengakibatkan terjadinya konflik antar agama, etnik, daerah sampai dengan kerusuhan antar mahasiswa.

Merosotnya akhlak dan moralitas elit bangsa serta "penghinaan" terhadap ideologi Pancasila karena: eksklusivisme kelompok, ketidakpedulian pada kesenjangan pembangunan, merebaknya praktek KKN pada semua cabang kekuasaan, sistem politik yang berbasis pada ikatan

etnis serta primordialisme agama yang digalang atas dasar sentimen pribadi.

Kita telah memasuki tahun 2007, berarti sembilan tahun kita berada dalam era reformasi. Kita pun bertanya, kemanakah reformasi ini membawa kita? Apa yang disebut reformasi justru sedang menempatkan kita bukan pada jalur yang benar dalam perjalanan kita sebagai bangsa. Kita sedang meninggalkan dan menanggalkan jati diri kita sebagai bangsa Indonesia. Perlu diserukan kembali kepada jati diri bangsa. Pada masa Bung Karno, jati diri bangsa juga disebut Kepribadian Indonesia, dan inti jati diri bangsa adalah Pancasila.

Mengapa kita kembali menyebutkan Pancasila sebagai inti jati diri bangsa? Karena kita cenderung telah melupakannya. Untuk itu kita perlu mengingatnya kembali dan mengamalkan nilai-nilainya di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Setelah sembilan tahun reformasi bergulir, secara gamblang dan salah kaprah kita pun berpendapat Pancasila telah gagal.

Kemudian kita mengarungi samudera berbangsa dan bernegara. Laksana bahtera kehilangan kemudi, kita melakukan berbagai eksperimen dengan berbagai macam ideologi-ideologi yang bukan Pancasila. Bahkan

untuk menyebut Pancasila saja kita malu. Para pejabat kita pun jarang menyinggung-nyinggung Pancasila dalam berbagai pidato-pidato resmi. Perilaku kita sebagai bangsa telah menafikan jati diri kita sebagai bangsa di dunia ini.

Kita sepakat, untuk mengatakan betapa arifnya para pendiri bangsa kita menemukan dan merumuskan Pancasila, bukan saja sebagai ideologi bangsa, tetapi sebagai payung besar yang di dalamnya kita bersatu. Kita telah mendengar berulang-ulang bahwa kemajemukan kita sangat tinggi dari segi suku, agama, ras dan etnis. Indonesia adalah suatu novum di dalam sejarah dunia.

Indonesia adalah *nation state* yang tidak diikat oleh kesatuan ras, agama ataupun kesukuan. Namun Indonesia berdiri dan ada karena diikat oleh landasan kesamaan nasib dalam perjalanan historis yang dijajah oleh kolonialisme Belanda. Dari konstruksi yang rapuh semacam itu negara bangsa Indonesia ini mudah sekali terpecah-pecah apabila tidak ada sesuatu yang diakui dan disepakati oleh semua unsur masyarakat yang berhimpun membentuk negara. Unsur perekat itu adalah semangat nasionalisme, Pancasila dan UUD 1945. Oleh karena itu, Pancasila adalah roh bangsa Indonesia

dan menjadi ideologi tertinggi di negeri ini.

Ketika kemerdekaan diproklamasikan, kita sesungguhnya telah mempunyai modal sosial yaitu perasaan kebangsaan yang ditanamkan dan ditumbuhkan melalui proses panjang yang tidak mudah dalam wujud kebangkitan nasional. Perasaan kebangsaan inilah yang diungkapkan sebagai Pancasila oleh Bung Karno. Inilah jati diri bangsa kita. Inilah kepribadian kita, ketika setiap anggota keluarga besar bangsa diperhitungkan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Dalam jati diri ini, tidak ada mayoritas atau minoritas. Yang ada ialah keluarga besar bangsa Indonesia.

Pancasila sebagai jati-diri bangsa sesungguhnya telah menyiapkan semua nilai-nilai yang dibutuhkan sebuah bangsa yang masyarakatnya sangat majemuk ini untuk dapat mempertahankan eksistensinya dalam perjalanan sejarahnya. Bermain-main dengan jati-diri bangsa, sama halnya dengan membunuh diri sendiri. Kita semua akan sangat menyesal apabila pada satu saat kelak Indonesia tidak lagi eksis, hanya karena kita tidak mampu memelihara, merawat, mempertahankan dan memperkembangkan warisan pendiri negara (*founding father*) kita

yang penuh kearifan ini.

Oleh karena itu, sejalan dengan tujuan gerakan reformasi yang paling esensial, yaitu pelaksanaan secara konsekuen nilai-nilai hakiki Pancasila dan Pembukaan UUD, maka perlu diadakan revitalisasi Pancasila sebagai filsafat dasar kenegaraan dan landasan ideologis kehidupan berbangsa yang terbuka dengan tafsiran yang multikultural dan berasas kerakyatan. Mengembangkan moral Pancasila melalui pendidikan yang dilandasi kepedulian religius. Merekonstruksi budaya politik dengan menguatkan pilar-pilar kehidupan demokrasi. Mengembangkan pemikiran intelektual dan massa dengan *platform* yang jelas dengan dilandasi oleh nilai-nilai yang telah dirintis para pendiri negara.

Di samping itu, kita perlu menyadari dan menghayati makna Ketuhanan Yang Maha Esa di dalam kehidupan beragama kita. Kehidupan beragama kita mestinya merupakan kehidupan yang lebih dewasa, karena ada pihak lain yang menghayati keberagamaannya dengan cara yang berbeda.

Kita perlu merenungkan kembali secara mendalam, makna kemanusiaan yang adil dan beradab, ketika nyawa manusia tidak lagi diperhitungkan dalam berbagai kerusakan dan teror.

Kita diajak untuk menghayati secara mendalam makna kebangsaan, ketika sekian banyak wilayah dan daerah hanya mementingkan kepentingannya sendiri melalui berbagai perda-perda yang merugikan pihak-pihak lainnya.

Kita perlu mengecamkan dengan benar makna kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, ketika kecenderungan menang sendiri begitu menguasai iklim perdebatan dan pengambilan-pengambilan keputusan.

Kita masih perlu belajar banyak tentang apa yang dimaksud dengan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, ketika sebagian besar rakyat Indonesia sangat sulit memperoleh makan hari ini, sementara sebagian kecil elite bisa menghambur-hamburkan uang dan kekayaannya.

Penutup

Beberapa hal yang dapat mendukung dalam pembentukan watak bangsa (*nation character building*) yang senantiasa berpijak pada nilai-nilai Pancasila adalah: pertama, perlunya mengesampingkan perbedaan-perbedaan sempit dan kedaerahan; kedua, perlunya menggalang solidaritas sosial dan solidaritas kebangsaan, guna memperkokoh integrasi nasional; ketiga, mene-

gakkan asas swadaya atau mengandalkan kekuatan sendiri dalam kehidupan nasional, politik sosial, ekonomi, dan hukum yang kuat berakar pada masyarakat.

Kemajuan ilmu pengetahuan teknologi juga mempunyai pengaruh ke bidang ekonomi, sosial dan budaya, bahkan ke dalam bidang ideologi dan politik. Secara strategis, cepat atau lambat seluruh perkembangan itu akan mempengaruhi pula corak dan pola kepemimpinan. Kepemimpinan adalah kemampuan untuk mengantisipasi kecenderungan masa depan, serta mempersiapkan langkah-langkah untuk menghadapinya, sehingga pencapaian tujuan dalam bidang kesejahteraan dan keamanan dapat dijamin tanpa terjadinya gejolak-gejolak sosial. Hal ini berarti bahwa setiap jenis kepemimpinan tidak dapat hanya sekedar mengikuti arus perkembangan. Setiap jenis kepemimpinan perlu mempunyai visi, wawasan, serta kemampuan untuk mewujudkan visinya itu ke dalam kenyataan konkrit yang didasarkan pada rinsip-nilai-nilai Pancasila kemanusiaan. Oleh karena itu, kepemimpinan harus mempunyai kemampuan berfikir strategis, antisipatif, dan adaptif yang senantiasa berpijak dan berpegang teguh pada prinsip-nilai-nilai Pancasila.

Daftar Pustaka

- Alfian, Ibrahim, 1997; "Nasionalisme dan Regionalisme di Wilayah Aceh", *Jurnal Ketahanan Nasional*, Program Studi Ketahanan Nasional S.Ps-UGM, Yogyakarta.
- Bahar, Saafroedin, 2001; "Pancasila sebagai Paradigma Pembangunan Nasional Bidang Sosial Politik", *Jurnal Ketahanan Nasional*, Program Studi Ketahanan Nasional S.Ps-UGM, Yogyakarta.
- Dani Purwanegara, 2004; "Genesis Ide Ketahanan Nasional", *Jurnal Ketahanan Nasional*, Program Studi Ketahanan Nasional S.Ps-UGM, Yogyakarta.
- Hirotsune, Kimura, 1999; "Desentralisasi: Bentuk Baru Integrasi Nasional", *Jurnal Ketahanan Nasional*, Program Studi Ketahanan Nasional S.Ps-UGM, Yogyakarta.
- Ichlasul Amal, Armaidly Armawi, (ed), 1996; *Sumbuhan Ilmu Sosial Terhadap Ketahanan Nasional*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta
- , (ed), 1997; *Keterbukaan Informasi, dan Ketahanan Nasional*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta
- , (ed), 1998; *Regionalisme, Nasionalisme, dan Ketahanan Nasional*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta
- Jacob, T, 1999; "Disintegrasi

- Moral Masyarakat dalam Perspektif Ketahanan Nasional", *Jurnal Ketahanan Nasional*, Program Studi Ketahanan Nasional S.Ps-UGM, Yogyakarta.
- Jacob, T, 1997 ; "Ketahanan Nasional dan Panetika", *Jurnal Ketahanan Nasional*, Program Studi Ketahanan Nasional S.Ps-UGM, Yogyakarta.
- Mardjono, 2004; "Mempertahankan NKRI melalui Budaya", *Jurnal Ketahanan Nasional*, Program Studi Ketahanan Nasional S.Ps-UGM, Yogyakarta.
- Santoso, Budi,SS, 2002 ; "Peranan Para Pemimpin dan Patriot Bangsa dalam Mempertahankan Kelangsungan Hidup Bangsa dan Negara", *Jurnal Ketahanan Nasional*, Program Studi Ketahanan Nasional S.Ps-UGM, Yogyakarta.
- Sunardi, R M, 2004; *Pembinaan Ketahanan Bangsa*, PT Kua-ternita Adidarma, Jakarta.
- Suradinata, Ermaya, 2001; "Geopolitik dan Geostrategi dalam mewujudkan Integrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia", *Jurnal Ketahanan Nasional*, Program Studi Ketahanan Nasional S.Ps-UGM, Yogyakarta.
- Suryohadiprojo, Sayidiman, 2001; "Integrasi Bangsa", *Jurnal Ketahanan Nasional*, Program Studi Ketahanan Nasional S.Ps-UGM, Yogyakarta.